Syariat Pilar Pembangunan Aceh

Setahun Pemerintahan Mualem-Dek Fadh

DOK BIRO ADPIM SETDA ACEH

MELAYANI MASYARAKAT - Potret Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, dan Sekda M Nasir dalam berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, serta pemerintahan, khususnya saat mengoordinasikan bantuan dan menyerahkannya langsung kepada warga terdampak banjir di Aceh. Ketiganya tampil kompak, seia-sekata, dan selalu sigap melayani masyarakat.

BANDA ACEH - Dalam satu tahun masa pemerintahan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh), Pemerintah Aceh mencatatkan rangkaian capaian strategis yang mencerminkan perpaduan antara penguatan nilai-nilai syariat, reformasi tata kelola pemerintahan, ketangguhan menghadapi bencana, serta akselerasi pembangunan sumber daya manusia.

Awal masa kerja ditandai dengan kebijakan bernuansa religius. Pada 14 Maret 2025, Gubernur menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan shalat fardhu berjamaah bagi ASN dan masyarakat, serta mengaji bersama di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran.

"InsyaAllah kami berkomitmen. Mari kita wujudkan ke depan Aceh yang lebih baik hingga pada saatnya nanti menjadi negeri *baldatun tayyibatun warabbul ghafur* (negeri yang baik, subur, makmur, nyaman untuk ditinggali)," kata Mualem saat memberikan sambutan, Selasa (4/3/2025) malam, di Masjid Raya Baiturrahman. Beberapa hari kemudian, Pemerintah Aceh meluncurkan Gerakan Aceh Berwakaf sebagai bagian dari penguatan nilai keislaman dalam kehidupan sosial.

Dalam aspek tata kelola keuangan, Aceh kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Kinerja pelayanan publik juga menunjukkan hasil yang membanggakan, dengan masuk delapan besar nasional (indeks 4,56), predikat Badan Publik Informatif (skor 97,06), serta nilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kategori "Sangat Baik" dengan skor 93,35.

Berbagai penghargaan nasional turut diraih, di antaranya enam kategori Anugerah Adinata Syariah 2025, Gold Award UB Halal Metric, Simpul Jaringan Kearsipan Terbaik Nasional, Lontar Awards, Lestari Awards, serta Outstanding Public Service Innovations atas inovasi layanan administrasi kependudukan.

> **InsyaAllah kami berkomitmen. Mari kita wujudkan ke depan Aceh yang lebih baik hingga pada saatnya nanti menjadi negeri *baldatun tayyibatun warabbul ghafur*.**
>
> **MUZAKIR MANAF**
> Gubernur Aceh

Di sektor sanitasi, Aceh mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Sumatera yang berstatus Stop Buang Air Besar Sembarangan (ODF). Pada bidang kehutanan dan lingkungan, koridor hidupan liar Pidie-Pidie Jaya berhasil ditetapkan dan forum pengelolaannya dibentuk, sementara sejumlah gampong meraih apresiasi ProKlim tingkat nasional.

Langkah strategis juga dilakukan dalam sektor sumber daya alam melalui Instruksi Gubernur Nomor 08/INSTR/2025 untuk menata ulang perizinan SDA, sebagai bagian dari pembenahan tata kelola dan penertiban tambang ilegal di Aceh.

Pada level kebijakan nasional, revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), termasuk perpanjangan otonomi khusus, berhasil masuk Prolegnas Prioritas 2025. Pemerintah Aceh juga mencatat keberhasilan diplomasi administratif dengan kembalinya empat pulau di Aceh Singkil-Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek-ke wilayah Aceh.

Di sektor sosial, perluasan jaminan kesehatan mengantarkan Aceh meraih UHC Award 2026 kategori utama. Pemerintah juga menggelontorkan bonus Rp72,9 miliar bagi atlet peraih medali PON serta mengerahkan ribuan ASN sebagai relawan saat bencana hidrometeorologi dengan posko tanggap darurat yang aktif 24 jam.

Sejak hari pertama bencana, Gubernur dan Wakil Gubernur turun langsung ke wilayah terdampak untuk memastikan distribusi bantuan dan koordinasi lintas sektor berjalan optimal. Di bawah kendali langsung keduanya, transisi dari fase darurat menuju pemulihan dikawal secara intensif.

Pada saat bersamaan, kepemimpinan Mualem-Dek Fadh berhasil melakukan advokasi ke pemerintah pusat sehingga Transfer ke Daerah (TKD) Aceh sebesar Rp1,7 triliun yang semula direncanakan dipotong pada Tahun Anggaran 2026 dapat dikembalikan. Komunikasi lintas kementerian juga membuahkan dukungan terhadap kebutuhan sosial-kultural masyarakat Aceh, termasuk persetujuan atas permintaan dukungan daging meugang. Melalui mekanisme transfer dana dari Presiden melalui Sekretariat Presiden kepada 19 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi, disalurkan dana bantuan kemasyarakatan senilai Rp 72.750.000.000 untuk pembelian sapi meugang.

Menjelang akhir periode tahun, langkah besar dilakukan di bidang kepegawaian dengan pengangkatan 5.486 tenaga kontrak menjadi PPPK paruh waktu. Sebelumnya, 5.789 PPPK tahap I dan 1.184 tahap II telah menerima SK.**(*)**

Sukses Benahi Sektor Pendidikan dengan Langkah Nyata

Di sektor pendidikan, Pemerintah Aceh melakukan penataan menyeluruh yang tidak hanya menyentuh aspek kepemimpinan sekolah, tetapi juga akses, mutu, dan tata kelola. Pada Mei 2025, Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Aceh menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.3.8/5936 Tahun 2025 tentang pengendalian aktivitas murid di malam hari. Edaran ini dikeluarkan sebagai bentuk perhatian serius Pemerintah Aceh untuk mencegah kenakalan remaja yang sering terjadi pada larut malam sekaligus meningkatkan kualitas akademik, vokasi, dan pembentukan karakter murid.

Pada 25 Desember 2025, Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada 93.201 siswa yatim/piatu penerima bantuan reguler dan 216 siswa penerima bantuan prestasi, yang seluruhnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh. Program ini bertujuan menjamin keberlanjutan akses pendidikan sekaligus meningkatkan motivasi belajar peserta didik.

Pada 31 Desember 2025, Dinas Pendidikan Aceh menerbitkan 148 pertimbangan teknis izin pendirian dan perpanjangan izin operasional satuan pendidikan negeri dan swasta. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen memastikan setiap satuan pendidikan memenuhi standar yang berlaku, sekaligus memperkuat tata kelola perizinan yang transparan dan akuntabel demi pemerataan layanan pendidikan.

Penguatan kurikulum juga dilakukan melalui peluncuran Buku Muatan Lokal pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal Aceh sebagai bahan ajar pendukung bagi para pendidik.

Momentum penting lainnya adalah pelantikan 201 Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh pada 26 Januari 2026. Pelantikan ini mengakhiri kekosongan kepemimpinan di 236 satuan pendidikan sejak 2022 yang sebelumnya dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Langkah tersebut memberikan kepastian pimpinan dan stabilitas sekolah, memperkuat akuntabilitas satuan pendidikan, meningkatkan motivasi guru dan tenaga kependidikan, mempercepat implementasi program prioritas pembangunan daerah dan nasional, meneguhkan komitmen pembinaan karakter pelajar Aceh, serta menjadi momentum reformasi manajemen pendidikan berbasis regulasi.

Selanjutnya, pada 5 Februari 2026, diterbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Penggunaan Gawai/Handphone pada SMA, SMK, dan SLB guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, meningkatkan fokus dan kedisiplinan peserta didik, serta mendukung pembelajaran yang efektif dan berkarakter.

Serangkaian penghargaan juga diberikan atas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, antara lain pejabat inspiratif, pimpinan daerah terbaik bidang komunikasi dan keterbukaan informasi, serta peringkat dua nasional dalam penganggaran perumahan layak huni.

Setahun berjalan, wajah pemerintahan Aceh memperlihatkan kombinasi yang seimbang antara penguatan syariat, pembenahan birokrasi, ketangguhan menghadapi krisis, serta investasi serius di sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan Aceh yang berkelanjutan.**(*)**

DOK BIRO ADPIM SETDA ACEH

BERBINCANG - Gubernur Aceh Muzakir Manaf berbincang dengan Presiden Prabowo saat kunjungan ke Aceh, beberapa waktu silam.

PANCACITA
PEMERINTAH ACEH
1 TAHUN
PRESTASI
PEMERINTAH ACEH
H. MUZAKIR MANAF
GUBERNUR ACEH
H. FADHLULLAH
WAKIL GUBERNUR ACEH
KEPEMIMPINAN & ARAH PEMBANGUNAN
Pemerintah Aceh kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 untuk kesepuluh kalinya berturut-turut.
Gubernur Aceh meraih Anugerah Pejabat Pemerintah Inspiratif (Tokoh Peusaboh Nanggroe) pada The Aceh Post Awards 2025.
Pemerintah Aceh menerima Penghargaan Wirasena 2025 atas capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Tahun 2024.
Pemerintah Aceh mencairkan bonus prestasi PON XXI/2024 kepada atlet dan pelatih sebagai bentuk apresiasi atas capaian olahraga nasional.
PENGUATAN SYARIAT ISLAM
Penerbitan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang kewajiban shalat fardhu berjamaah dan mengaji sebelum belajar.
Peluncuran Gerakan Aceh Berwakaf.
Pemerintah Aceh meraih Gold Award UB Halal Metric Award 2025.
Pemerintah Aceh meraih 6 kategori Anugerah Adinata Syariah 2025 tingkat nasional.
Pemerintah Aceh menerima Penghargaan Kepala Daerah Peduli Pesantren pada Anugerah Pesantren Award 2025.
Pemerintah Aceh meraih penghargaan IMTI 2025 sebagai destinasi pariwisata ramah muslim.
PERTANIAN & KETAHANAN PANGAN
Pemerintah Aceh berhasil membina KUPS Serbok Jaboi Kota Sabang sebagai KUPS terbaik nasional.
Penyuluh Kehutanan Aceh meraih Penghargaan Wanalestari Nasional 2025.
Kelompok Tani Hutan Aceh meraih Wanalestari Nasional Harapan II.
PELAYANAN KESEHATAN
Aceh menjadi Provinsi Open Defecation Free (ODF) pertama di Sumatera.
Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Utama dari BPJS Kesehatan.
PERBANKAN & BUMD
Pemerintah Aceh menerima Penghargaan Top Pembina BUMD pada ajang Top BUMD Awards 2025.
BPR Syariah Mustaqim raih status Bintang 5 & Direktur Utama raih Top CEO.
TRANSPORTASI & DIGITALISASI
Pemerintah Aceh meraih Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik Nasional pada ajang JIKN 2025.
Pemerintah Aceh meraih Lontar Awards dan Lestari Awards 2025 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS).
Penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Provinsi Aceh memperoleh kategori Sangat Baik dengan skor 93,35.
PERUMAHAN RAKYAT
Pemerintah Aceh menerima Penghargaan Dukungan Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pemerintah Aceh meraih Peringkat 2 Provinsi Terbaik Penganggaran Perumahan dalam APBD.
PENDIDIKAN
Pemerintah Aceh menerima Penghargaan Pesantren Award 2025 atas dukungan pengembangan pendidikan pesantren.
Pemerintah Aceh meraih Penghargaan Subroto 2025 atas pengembangan pendidikan vokasi sektor ESDM.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Edaran Dinas Pendidikan Aceh untuk mengendalikan aktivitas murid di malam hari guna mencegah kenakalan remaja dan meningkatkan kualitas karakter serta akademik.
Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Menerbitkan Surat Edaran pada 5 Februari 2026 mengenai pembatasan penggunaan gawai (handphone) di lingkungan SMA, SMK, dan SLB untuk menciptakan suasana belajar yang lebih fokus dan kondusif.
Menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada 93.201 siswa yatim/piatu untuk kategori reguler dan 216 siswa untuk kategori prestasi pada Desember 2025.
Melantik 201 Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh pada 26 Januari 2026, yang sekaligus mengakhiri kekosongan pimpinan (status Plt) di 236 sekolah sejak tahun 2022. Langkah pelantikan ini bertujuan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan motivasi tenaga kependidikan, serta mempercepat program prioritas daerah.
Menerbitkan 148 pertimbangan teknis terkait izin operasional satuan pendidikan negeri dan swasta untuk memastikan standar pelayanan yang transparan dan akuntabel.
Meluncurkan Buku Muatan Lokal pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal Aceh.
Melaksanakan Try Out seleksi nasional berbasis tes bagi siswa SMA/SMK/MA se-Aceh pada Januari 2026 sebagai simulasi dan pemetaan kemampuan akademik siswa.
ISU STRATEGIS
Empat pulau (Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek) resmi kembali ke wilayah administratif Aceh.
Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) termasuk di dalamnya perpanjangan dana otsus resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2025.
Keberhasilan advokasi Pemerintah Aceh sehingga TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp1,7 triliun yang semula dipotong dapat dikembalikan oleh Pemerintah Pusat.
RENCANA AKSI PGC
Penetapan Koridor Hidupan Liar Pidie-Pidie Jaya melalui Keputusan Gubernur.
Pembentukan Forum Pengelolaan Koridor Hidupan Liar Pidie-Pidie Jaya.
Penerbitan Instruksi Gubernur Aceh tentang Penataan Perizinan Sumber Daya Alam.
Pemerintah Aceh meraih apresiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) kategori utama di Kota Langsa dan Aceh Barat Daya.
TANGGAP BENCANA
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 dan pembentukan Posko Tanggap Darurat.
Pengerahan ribuan relawan ASN untuk penanganan pascabencana banjir dan longsor di berbagai wilayah Aceh.
Penyaluran bantuan dana sapi meugang senilai Rp72,75 miliar bagi 19 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh melalui dukungan Pemerintah Pusat.
REFORMASI BIROKRASI & SDM APARATUR
Pemerintah Aceh masuk 8 besar nasional kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (Kategori A).
Pemerintah Aceh meraih predikat Badan Publik Informatif dengan skor 97,06.
Pemerintah Aceh meraih OPSI KIPP 2025 melalui inovasi FastDuk (Solusi Cepat Layanan Adminduk).
Penyerahan SK PPPK Tahap I, II, dan PPPK Paruh Waktu kepada ribuan tenaga kontrak hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Gubernur Aceh meraih Pimred Award 2025 atas keterbukaan informasi publik.
Adpim
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH
www.humas.acehprov.go.id humasaceh
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa